

AKTUALISASI PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN ETIKA BERNEGARA

Istani*

¹Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia.

*e-mail: istanipyunus@gmail.com

Abstrak

Bermula saat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945 guna membahas dasar negara di Gedung Chuo Sangi In, Sejarah lahirnya Pancasila pun dimulai. Setelah mengetahui dan memahami sejarah lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945 serta perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia oleh Para Tokoh Bangsa Indonesia, maka sebagai penerus Bangsa wajib untuk mengaktualisasikan Pancasila. Makalah ini akan menggali lebih lanjut mengenai Aktualisasi Pancasila terutama dalam pembentukan etika bernegara.

Kata Kunci: bernegara, etika, pancasila.

Abstract

The history began when Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) held the first session on May 29 until June 1 1945 to discuss the basics of the country. It held at the Chuo Sangi In Building. After knowing and understanding the history of the birth of Pancasila on June 1, 1945 and the formulation of Pancasila as the basis of the Indonesian state by Indonesian Nation Leaders, so as the nation's successors, we are obliged to actualize Pancasila. This paper will explore further about the actualization of Pancasila, especially in the formation of state ethics.

Keywords: ethic, Pancasila, state.

1. PENDAHULUAN

Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas penghayatan, pemahaman dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara, perlu penataan kembali sistem Pendidikan Moral Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, sebagai Filsafat bangsa dan Negara Indonesia, Asas Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia, sebagai Jati Diri Bangsa Indonesia serta sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia melalui jalur Pendidikan Dasar Nasional dan masuk dalam kurikulum pembelajaran wajib di Sekolah-sekolah sampai Perguruan Tinggi, karena terbukti dengan memiliki kemampuan pemahaman, penghayatan dan pengamalan Pancasila, mulai dari generasi muda bangsa sudah memiliki etika dan moral yang tinggi, maka Aktualisasi Pancasila dalam Pembentukan Etika Bernegara akan tercapai dengan Kualitas Bangsa yang Beriman, Elok, Relegius, Kuat, Amanah dan Harmonis (KB-BERKAH).

Kualitas Bangsa yang Beriman, Elok, Relegius, Kuat, Amanah dan Harmonis (KB-BERKAH) dalam kehidupan sehari-hari harus sejalan dengan pemahaman, penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an sebagai Kitab yang lengkap dan sempurna, pemberi petunjuk, pembeda antara yang hak dan bathil dan tidak ada satu aspek pun dalam kehidupan manusia yang tidak dibicarakan atau disinggung dalam Al-Qur'an. Sekarang tidak sedikit anak-anak, remaja, pemuda dan orang tua yang fasih membaca Al-Qur'an. Sementara sekarang sedikit sekali anak remaja, pemuda yang hapal Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk kita sebagai penyelenggara negara ini sudah banyak yang lupa akan Pancasila, bahkan banyak yang tidak mengetahui kalau dulu ada 36 Butir Pengamalan Pancasila dan yang sekarang menjadi 45 Butir Pengamalan

Pancasila, padahal Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, sebagai Dasar Filsafat Bangsa dan Negara Indonesia, sebagai Asas Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia, sebagai Jati Diri Bangsa Indonesia serta sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia.

Upaya meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, untuk mewujudkan Aktualisasi Pancasila Dalam Pembentukan Etika Bernegara perlu ditegakkan, sebab nilai-nilai atau norma dan/atau etika dan moral yang ditegakan dalam kehidupan sehari-hari akan berdampak positif pada penguatan hubungan antar manusia dalam suatu negara atau bangsa-bangsa dalam berbagai negara di muka bumi ini.

Dalam proses penegakan Aktualisasi Pancasila dalam Pembentukan Etika Bernegara ini, semua warga negara wajib terlibat sesuai dengan bidang dan perannya masing-masing, mulai dari penyelenggara negara dan pemerintahan, pemerintah daerah, tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Dosen, Guru, Mahasiswa, Pejar dan para orang tua, termasuk para pengusaha, pedagang dan buruh wajib memiliki etika-moral yang baik dan teruji dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai makhluk individu dan makhluk sosial manusia tidaklah mungkin memenuhi segala kebutuhannya sendiri, oleh karena itu untuk mengembangkan potensi kemanusiannya, ia selalu memerlukan orang lain. Dalam pengertian inilah maka manusia senantiasa hidup sebagai bagian dari lingkungan sosial yang lebih luas, secara berturut-turut lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan bangsa dan negara yang merupakan Lembaga-lembaga masyarakat utama yang diharapkan dapat menyalurkan dan mewujudkan Pancasila sebagai pandangan hidupnya. Dengan demikian dalam kehidupan bersama dalam suatu negara membutuhkan suatu tekad kebersamaan, cita-cita yang ingin dicapainya yang bersumber pada Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Filsafat Bangsa dan Negara Indonesia, Asas Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia serta sebagai Jati Diri Bangsa Indonesia dan sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia, yaitu Pancasila.

Aktualisasi Pancasila dalam Pembentukan Etika Bernegara, tidak akan dapat tercapai, jika para Pejabat atau Penyelenggara Pemerintahan dan/atau Penyelenggara Negara belum memiliki pemahaman, penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Prinsip Penguatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan Pancasila dapat mepekuat etika yang kuat dalam individunya sebagai manusia. Etika adalah nilai-moral yang menjadi pedoman individu maupun kelompok. Etika berarti suatu kebenaran dari tindakan atau perilaku manusia terkait kodrat yang memang melekat pada diri manusia sendiri. Etika memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang membedakannya dengan norma lain.

Etika mengatur tindakan atau perilaku manusia dalam Berbangsa dan Bernegara Ciri-ciri, seperti 1) Etika akan tetap berlaku meski tidak ada orang lain yang melihat kita; 2) Etika memiliki sifat absolut atau mutlak; 3) Etika berkaitan dengan perbuatan atau perilaku manusia; dan 4) Terdapat cara pandang dari segi batiniah manusia di dalam etika. Etika juga berkaitan dengan moral dan kode etik.

Ciri-ciri etika ini dapat juga disebut sebagai Prinsip Etika. Prinsip etika ini harus, bahkan wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia yang disiapkan sejak dari buaian sampai ke liang lahat, dari Tingkat Anak Sekolah Taman Kanak-Kanak sampai Tingkat Perguruan Tinggi, hingga menjadi penyelenggara negara yang profesional sesuai bidangnya masing-masing. Kekuatan dan kemampuan pemahaman terhadap prinsip etika ini demi Keutuhan Bangsa Indonesia dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat menjamin Aktualisasi Pancasila dalam Pembentukan Etika Bernegara.

Aktualisasi Pancasila dalam Pembentukan Etika Bernegara, dapat bertahan dan semakin kuat kemampuannya, apabila penyelenggara negara dalam hal ini adalah Pemerintah dan Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) berjalan seia sekata, setiap melakukan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan bersama untuk terlaksananya kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Mempertahankan kemampuan Aktualisasi Pancasila dalam Pembentukan Etika Bernegara akan terus-menerus dapat berjalan dengan baik dan benar, jika seluruh warga negara selalu siap dan wajib mendukung, menindaklanjuti dan melaksanakan setiap keputusan yang diambil oleh penyelenggara pemerintahan, termasuk didalamnya adalah dukungan dan tindak lanjut dari semua potensi generasi muda (Remaja dan Pemuda) Indonesia yang berkarakter kebangsaan Indonesia, sebagai penegak penerus kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karakter remaja atau pemuda yang bisa menjadi teladan dan sumber inspirasi bagi sesamanya sepanjang zaman adalah remaja atau pemuda yang memiliki nilai idealisme, kejujuran dan kepeloporan, dedikasi, loyalitas, dan pengabdian kepada orang banyak, keteguhan dalam mempertahankan iman, dan perjuangan hidup menghadapi kesulitan menuju puncak prestasi. Oleh karena itu, maka pembinaan generasi muda menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat dan negara.

Tanggung jawab keluarga dalam pembinaan generasi muda sebagai media dan lembaga Pendidikan pertama dan utama bagi setiap anak perlu dimulai dari menanamkan nilai-nilai agama, sosial dan budaya serta sifat-sifat alam dan lingkungan. Nilai-nilai atau norma agama, sosial dan budaya yang perlu ditanamkan pada anak-anak sejak dari kehidupan di keluarga adalah norma-norma yang bersifat tetap dimasyarakat. Norma-norma ini ada yang berupa sunnatullah, yaitu ketentuan dan hukum Allah yang berlaku di alam ini, sehingga Sebagian orang menyebutnya sebagai hukum alam, tetapi ada yang berasal dari syariat agama. Norma-norma ini perlu dipahami dan dihayati oleh setiap orang supaya hidupnya selamat hidup di dunia dan akhirat, terwujud hubungan yang harmonis dalam masyarakat dan dengann alam lingkungan. Tanggung jawab masyarakat terhadap pembinaan generasi muda dapat dilakukan melalui organisasi remaja atau pemuda, misalnya melalui organisasi Remaja Masjid.

Hasil pembahasan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia, oleh para tokoh yang kuat pemahamannya terhadap nilai-nilai Pancasila sebelum Pancasila itu lahir, karena memiliki etika yang kuat. Etika adalah nilai dan moral yang menjadi pedoman individu maupun kelompok yang mengatur tindakan atau perilaku manusia untuk mewujudkan Aktualisasi Pancasila Dalam Pembentukan Etika Bernegara. Hasil dan Pembahasan selanjutnya dimuat dalam perumusan tulisan Aktualisasi Pancasila dalam Pembentukan Etika Bernegara berikut ini.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 sejarah lahirnya Pancasila di mulai. Bertempat di Gedung Chuo Sangi In di Jl. Pejambon 6 Jakarta, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mengadakan sidang pertama untuk membahas dasar negara. Namun, pada sidang ini, belum memukan titik terang mengenai dasar negara Indonesia. Selanjutnya sidang dilanjutkan pada tanggal 1 Juni 1945, dimana Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara Indonesia merdeka dan mengemukakan terkait Pancasila. Hal ini kemudian diterima secara aklamasi oleh Anggota BPUPKI.

BPUPKI pun membentuk Panitia Sembilan, adalah Soekarno, Abiskoeno Tjokrosoejoso, Mohammad Hatta, Mr. A.A Maramis, Muhammad Yamin, Achmad Soebarjo, Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hasyim, dan Agus Salim untuk merumuskan Dasar Negara Indonesia untuk dimasukkan dalam Mukadimah UUD 1945. Pancasila kemudian dinyatakan resmi dan disahkan sebagai dasar negara Indonesia Merdeka, pada tanggal 18 Agustus 1945 di Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sesuai dengan perkembangan zamannya Aktualisasi Pancasila

dalam Pembentukan Etika Bernegara telah terbukti kemampuannya untuk membina hubungan sesama Bangsa Indonesia dan sesama Bangsa-Bangsa antar Negara di dunia ini. Berdasarkan TAP MPR NoOMOR II/MPR/1978, Kini Pancasila memiliki 45 Butir Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila, sesuai TAP MPR NOMOR I TAHUN 2003.

2.1. Aktualisasi Pancasila

Para pendiri negara Indonesia sadar sepenuhnya akan makna fundamental dasar negara Indonesia merdeka didirikan yaitu sebagai hidup bagi bangsa Indonesia itu sendiri yang merupakan perwujudan dan nilai yang dihayati, diyakini, dan dimiliki kebenarannya bagi masyarakat Indonesia sepanjang masa dalam sejarah perkembangan dan pertumbuhan bangsa sejak lahir.¹

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan terutama dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), memadatkan dan merumuskan dan nilai-nilai yang dihayati, diyakini, dan dimiliki kebenarannya bagi Masyarakat Indonesia menjadi Pancasila dimana rumusannya tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.²

Dalam hubungan inilah maka Pancasila yang bersumber pada nilai-nilai budaya bangsa ini disebut sebagai *National Character*. Istilah ini diambil dari tokoh Margareth Mead, Ralp Linton dan Abraham Kardiner dalam *Antropology to Day*. Selanjut Linton lebih menyebutnya sebagai *People Character* dan jika dibahasakan dalam suatu negara disebut sebagai *National Identity* yang dalam Bahasa Indonesia diartikan menjadi Jatidiri Bangsa Indonesia.³

Hasil pembahasan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia, oleh para tokoh yang kuat pemahamannya terhadap nilai-nilai Pancasila sebelum Pancasila itu lahir, karena memiliki etika yang kuat. Etika adalah nilai dan moral yang menjadi pedoman individu maupun kelompok yang mengatur tindakan atau perilaku manusia untuk mewujudkan Aktualisasi Pancasila Dalam Pembentukan Etika Bernegara.

17 Agustus 1945, Kemerdekaan Indonesia dan merupakan hari dimana Indonesia diresmikan menjadi negara yang berdaulat dan merdeka. Untuk membuat Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat bukanlah suatu hal yang mudah, haruslah mendapat pengakuan dari negara-negara lain yang berdaulat. Dimana terdapat 2 (dua) jenis pengakuan, yaitu pengakuan *De Jure* dan pengakuan *De Facto*. Negara Mesir yang pertama memberikan pengakuan kepada Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat.⁴ Kemudian sesudah Negara Mesir, yang mengakui Negara Indonesia merdeka dan berdaulat adalah Negara Siria, Negara Vatikan, Negara Lebanon, Negara Yaman, Negara Irak dan Negara Arab Saudi. 7 (tujuh) Negara inilah yang pertama kali memberikan pengakuan Indonesia Merdeka.

Kemerdekaan ini diperoleh, berdasarkan perjuangan Bangsa Indonesia sendiri, karena kemerdekaan itu hak segala bangsa.

1.1.1. Prinsip Sila Pertama

Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, serta mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk

1 Prof. Dr. h. Kaelan, M.S., *Filsafat Hukum Pancasila dan Semiotika Hukum Pancasila*, Paradigma Yogyakarta, 2020, h.21

2 *Ibid*, h.24

3 *Ibid*.

4 Lukman Hakiem, 2017. *Merawat Indonesia : Belajar daru Tokoh dan Peristiwa*. Jakarta Timur : Pustaka Al Kautsar.

agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala merupakan bangsa yang religious dalam pengertian bangsa yang percaya terhadap Tuhan pencipta. Ungkapan atas pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa tercermin antara lain Ompu Debata atau Debata Malajadi Nasional Bolon (Batak), Gae Dewa (Ngada), Tuh (Kalimantan), To Latung (Bugis), Sang Hyang (Jawa). Hal ini juga tercermin saat ada orang yang meninggal dunia itu disebut berpulang atau Kembali kepada Sang Penciptanya.⁵

1.1.2. Prinsip Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab)

Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Memperlakukan dan mengakui dan manusia sesuai dengan dan martabat dan harkatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, serta mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, kepercayaan, agama, jenis kelamin, keturrunan, warna kulit, kedudukan sosial, dan menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia.

1.1.3. Prinsip Sila Ketiga (Persatuan Indonesia)

Sila Ketiga, Persatuan Indonesia. Mampu menempatkan kesatuan, persatuan, keselamatan dan kepentingan bangsa serta negara sebagai kepentingan di atas kepentingan pribadi dan golongan, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, rela berkorban dan sanggup berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan, serta.

Perwujudan dari cita-cita persatuan kesatuan ini tercatat dalam sejarah, dimana terdapat kerajaan yang dapat digolongkan berifat "nasional" yaitu Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya.

1.1.4. Prinsip Sila Keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan)

Sila Keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Setiap manusia di Indonesia mempunyai hak dan kewajiban, kedudukan yang sama, sehingga tidak boleh memaksakan kehendak atau keinginan kepada orang lain. Musyawarah harus diutamakan guna mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat dengan menjunjung tinggi serta menghormati setiap keputusan yang dicapai serta keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

Semangat gotong royong dan asas kekeluargaan, Negara adalah untuk rakyat. Hal ini karena pengambilan keputusan selalu digunakan asas musyawarah mufakat. Contoh musyawarah mufakat adalah "rembug desa, wanua, kuria', kerapatan nagari', wanua, nua, dan banua,"

1.1.5. Prinsip Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia)

Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Perbuatan yang luhur dimanacmencerminkan suasana dan sikap kegotongroyongan dan kekeluargaan, serta mengembangkan sikap adil, menghormati hak orang lain, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, suka memberi pertolongan kepada orang lain.

5 Prof. Dr. h. Kaelan, M.S., Filsafat Hukum Pancasila dan Semiotika Hukum Pancasila, Penerbit Paradigma Yogyakarta, 2020, h.22

Keadilan sosial ini sudah ada sejak dahulu bagi Bangsa Indonesia. Masyarakat yang memiliki cita-cita yang “gemah ripah loh jinawi tata tentram karta raharja” yang artinya suatu keyakinan yang ada dalam masyarakat (terutama Masyarakat Jawa) yang menyatakan bahwa masyarakat makmur dan adil dapat terwujud dengan datangnya Ratu Adil.

Dengan hal ini, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara dibutuhkan tekad kebersamaan, cita-cita yang ingin dicapai yang bersumber pada Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Filsafat Bangsa dan Negara Indonesia, Asas Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia serta sebagai Jati Diri Bangsa Indonesia dan sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia, maka setiap masyarakat Indonesia harus memperkuat pemahaman, penghayatan dan pengamalan serta berjiwa Pancasila.

1.1.6. Peran Generasi Muda dalam Mengaktualisasikan Pancasila

Masyarakat Indonesia sudah mulai meninggalkan dan bahkan melupakan nilai-nilai Pancasila, padahal Pancasila merupakan ideologi dan jati diri bangsa Indonesia. Memperteguh penanaman nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari adalah cara sederhana yang dapat dilakukan oleh para generasi muda dalam mengaktualisasikan Pancasila. Generasi muda (pemuda) harus dapat bersatu walaupun berbeda suku, agama, dan budaya. Dengan berpikir demokratis, rasional, dan kritis dapat membantu menyelesaikan segala masalah yang ada di NKRI.

Sebagai usaha untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, Generasi muda harus mempunyai jati diri yang sesuai dengan nilai luhur bangsa. Generasi Muda adalah yang dapat menjadi tumpuan para generasi sebelumnya guna mengembangkan suatu bangsa. Ide-ide yang berilmu dari generasi muda dengan wawasan yang luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Peran pemuda juga senantiasa menjadi penggerak dan pilar dalam mencapai kemerdekaan bangsa sebagaimana yang tercatat dalam sejarah.

Dalam rangka upaya mempertahankan aktualisasi Pancasila dalam pembentukan etika bernegara perlu dilakukan peningkatan pemahaman terhadap Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila melalui jalur pendidikan formal, in formal dan non formal. Jalur-jalur Pendidikan formal, in-formal maupun non-formal untuk mengajarkan etika individu, etika bersekolah, etika berorganisasi dan etika bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan melalui pendidikan formal (sekolah) atau melalui organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi pemerintahan dan/ atau swasta, perlu diajarkan kembali tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, sebagai Dasar Negara Indonesia, sebagai Asas Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia, sebagai Jati Diri Bangsa Indonesia dan sebagai Ideologi Bangsa Indonesia. Tingkatan pendidikan ini disesuaikan dengan usia remaja/pelajar, Pemuda/ Mahasiswa, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama dan Pejabat Penyelenggara Negara atau Pejabat Pemerintahan di atas dasar negara Pancasila.

2.2. Prinsip Etika

Etika berasal dari kata etik dalam Bahasa Yunani yaitu *Ethos*, yang berarti kebiasaan atau tingkah laku. Tingkah laku atau perilaku manusia yang baik sebagai suatu Tindakan yang harus dilaksanakan manusia sesuai dengan moral. Jika diartikan lebih lanjut, etik merupakan suatu penjabaran dari proses dan teori filsafat moral terhadap kenyataan yang berhubungan erat dengan prinsip-prinsip dasar serta konsep yang membimbing manusia

dalam bertindak dan berpikir. Selanjutnya, Etika dapat dimaknai sebagai suatu ilmu yang mempelajari keburukan dan kebaikan hidup manusia, terutama perbuatan manusia yang didorong oleh kehendak dan didasari fikiran yang jernih dengan pertimbangan perasaan.

Beberapa pengertian Etika, antara lain:

- 1) Etika adalah suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral.
- 2) Etika merupakan suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu.
- 3) Etika mempertanyakan prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia.
- 4) Etika pada pokoknya membicarakan masalah-masalah yang berkaiatan dengan predikat nilai “susila” dan “tidak susila”

Etika juga disebut filsafat moral yang membahas tentang moralitas. Etika membicarakan tentang pertimbangan-pertimbangan tentang Tindakan-tindakan baik dan buruk, susila dan tidak susila, etis dan tidak etis dalam hubungan antar manusia. Etika dapat dikelompokkan menjadi tiga macam: 1) Etika Deskriptif, yaitu berusaha menjelaskan pengalaman moral dengan cara diskriptif, misalnya pertimbangan tentang nilai, pertimbangan tentang kebaikan dan keburukan, Susila dan tidak Susila dalam kaitannya dengan tingkat laku manusia dalam hubungan dengan manusia lain. 2) Etika normative, yaitu membahas pertimbangan yang dapat diterima apa yang harus ada dalam pilihan dan penilaian. Keharusan moral merupakan masalah pokok. Pertimbangan tentang kewajiban dan keharusan melakukan Tindakan tertentu. 3) Metaetika, yang menekankan pada analisis, istilah Bahasa yang dipakai untuk membenarkan Tindakan-tindakan dan pernyataan-pernyataan etika. Misalnya “apakah arti baik itu?”, “apakah penilaian moral dapat dibenarkan? Dan lain sebagainya.⁶

Moral adalah keabsolutan dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh, penilaian terhadap moral dinilai dari kebudayaan masyarakat setempat. Moral adalah perbuatan tingkah laku, ucapan, moral berasal dari kata “Mos” yang berarti kebiasaan. Kata “Mores yang berate kesusilaan. Moral adalah ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dll, yang meliputi akhlak budi pekerti dan Susila. Moralitas adalah keseluruhan norma, nilai-nilai dan sikap seseorang atau suatu kelompok masyarakat yang terungkap dalam sikap perbuatan lahiriah maupun ungkapan sepenuh hati, karena aia sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya.

Antara etika dengan moral sangat berhubungan erat, karena antara etika dan moral memiliki objek yang sama, yaitu sama-sama membahas tentang perbuatan manusia untuk menentukan baik atau buruk dari suatu perbuatan. Dalam hal tertentu antara etika dan moral ada perbedaan. Tolok ukur yang digunakan moral adalah untuk mengukur tingkah laku manusia adalah adat istiadat, kebiasaan dan lainnya yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Etika dan moral pada dasarnya memiliki kesamaan makna, namun dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk system nilai yang ada.

Ada beberapa masalah etika dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, ungkap Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Madaman Harahap pada Seminar Penguatan Etika Berbangsa dan Bernegara di Universitas Indonesia (25 Februari 2016).⁷ Di antara permasalahan tersebut adalah maraknya praktik korupsi, lemahnya

6 Harold H. Titus, dkk., *Persoalan-persoalan Filsafat*, terj. Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1984 hal 21-22.

7 <https://www.ui.ac.id>. Seminar Penguatan Etika Berbangsa dan Bernegara, 25 Feb, 2016.

tanggung jawab publik para pejabat negara, maraknya tindak kekerasan, dan lemahnya tingkat disiplin dan keadaban publik.

Lemahnya tingkat disiplin dan keadaban publik merupakan masalah yang begitu sering dilakukan masyarakat Indonesia. Contoh sederhananya adalah ketidakdisiplinan dalam berlalu lintas, minimnya kedisiplinan dalam merawat fasilitas umum dan menjaga kebersihan lingkungan dan kurangnya penghormatan terhadap hak milik orang lain. Untuk meningkatkan etika dalam bermasyarakat peran keluarga dan pendidikan sangat penting. Pendidikan agama sangat diperlukan untuk menghayati norma-norma dalam membangun masyarakat yang beretika. Pengawasan untuk tetap menjaga dan memelihara etika dapat dilakukan oleh siapapun, termasuk anak.

2.3. Prinsip Bernegara

Negara berdiri untuk memudahkan anggotanya yaitu masyarakat dapat mencapai tujuan Bersama. Tujuan bersama ini kemudian dirumuskan dalam dokumen yang dibuat menjadi konstitusi yang didalamnya terdapat nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh anggota negara (rakyat). Konstitusi merupakan dokumen tertinggi pada suatu negara sehingga konstitusi juga mengatur bagaimana negara dikelola. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar merupakan dokumen konstitusi.

Sebagaimana terkait dengan alinea II Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Tuhan menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kemudian bangsa-bangsa ini akan membuat komunitas tersendiri dan komunitas-komunitas ini jika dikumpulkan akan berbentuk negara.

Dalam Pandangan Islam, Prinsip bernegara yaitu Prinsip musyawarah, Prinsip ketaatan kepada pemimpin; Prinsip keadilan; Prinsip Amanah; dan Prinsip hubungan antar umat dari berbagai agama. Beberapa prinsip bernegara ini akan dibahas sebagaimana berikut:

1.1.1. Prinsip Amanah

Prinsip Amanah adalah berkaitan dengan setiap orang, termasuk didalamnya kepala negara sebagai penyelenggara negara. Selain itu, perilaku yang menjadi dasar tindakan dan kebijakan pemimpin adalah untuk kemaslahatan bangsa. Tindakan pemimpin untuk rakyatnya terikat oleh kepentingan umum (*tasharruf al-imam `ala al-ra`iyyah manuthun bi al-mashlahah*). Sehingga, sebagai pemimpin wajib bertindak tegas bukan hanya kebaikan diri dan kelompoknya semata, namun untuk kebaikan bangsa. hal ini diturunkan dari moral kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang tertulis dalam Alquran QS at-Taubah ayat 128.

Yang artinya “Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin.⁸ (QS at-Taubah : 128).

1.1.2. Prinsip Keadilan

Keadilan yang merupakan bagian dari prinsip bernegara ini sebenarnya memiliki beberapa tingkatan yaitu keadilan terhadap keluarga, diri sendiri, masyarakat serta negara. Dalam tingkat nasional terdapat Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Tinggi, dan Mahkamah Agung. Tingkat peraturan perundang-undangan ada yang disebut dengan Mahkamah Konstitusi (MK). Pada tingkat Internasional terdapat Peradilan Internasional.

8 (QS al-Taubah [9]: 128).

3. KESIMPULAN

Bernegara merupakan suatu kehidupan bersama dalam suatu wilayah yang terdiri dari penduduk (warga negara) dan penyelenggara negara (Pemerintahan) yang diakui keberadaannya oleh negara-negara lain di dunia. Suksesnya suatu kehidupan berbangsa dan bernegara bergantung pada sejauh mana seorang pemimpin suatu negara mampu bertindak adil dalam memutuskan perkara, dari kepemimpinan yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Pemimpin harus mengetahui mana yang mendapat hukuman, ganjaran, teguran dan pemecatan. Prinsip keadilan itu amat digandrungi di tengah masyarakat, termasuk dunia Islam.

Etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terbentuk sebagai etika bernegara yang sangat kuat pengaruhnya dalam menegakkan dan mewujudkan Aktualisasi Pancasila dalam Pembentukan Etika Bernegara. Di Indonesia, etika politik ini sangat besar pengaruhnya terhadap pengaturan hubungan antara warga negara dengan penyelenggara negara Indonesia (dalam negeri) serta antara penyelenggara dalam negeri dengan penyelenggara negara di luar negeri baik hubungan bilateral maupun hubungan multilateral, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pancasila dalam Pembentukan Etika Bernegara, wajib dipertahankan kemampuannya agar aktualisasinya terus-menerus dapat berjalan dengan baik dan benar, maka seluruh warga negara Indonesia berkewajiban meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam menindaklanjuti setiap keputusan yang diambil oleh penyelenggara negara Indonesia, yang berdasarkan Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Asvi Warman. 2015. Jiwa Seni Bung Karno di Patung Selamat Datang dalam <http://devel.monitorday.com/2015/03>
- Ariyanto, Bambang. 2012. Lunturnya Semangat Nasionalisme dalam <http://www.antarajatim.com/2012/31>
- Cohen, Bruce J. Pengertian Sosialisasi dan Tujuan Sosialisasi Menurut Ahli dalam <http://www.apapengertianahli.com/2015/06>
- Dirdjosisworo, Soejono. 1985. Pengertian Sosialisasi dalam <http://ahmadfathoni.zonasiswa.com/2014/07>
- Hasal Alwi dkk, Kamus Besar Indonesia, (t.tp : Balai Pustaka, T.th) Cetakan Pertama, Edisi III <https://www.ui.oc.id>. Seminar Penguatan Etika Berbangsa dan Bernegara, 25 Feb, 2016.
- Kaelan. 2020. *Filsafat Hukum Pancasila dan Semiotika Hukum Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma
- Kubicek, Jeremie. 2011. *Leadership is Dead: How Influence is Riviving it*. New York. Howard Book.
- Learniseasy. 2015. Proses Sosialisasi dan Macam Macamnya dalam <http://learniseasy.com/2015/09>
- Peter L. Berger, Luckmann dan Goffman. Definisikan Sosialisasi Primer dan Sosialisasi Sekunder dalam <https://rosynira.wordpress.com/2013/18>
- PGI. 2012. Kekerasan Meningkat Akibat Lunturnya Nilai-Nilai Nasionalisme dalam <http://pgi.or.id/2012/10>
- Sasrawan, Hedi. 2013. Pengertian Sosialisasi dalam <http://hedisasrawan.blogspot.com/2013/01>
- Sumardjono, Maria S. W. 2001. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*. Jakarta : Gramedia.
- NN. 2019. Tafsir Maudhu'i (Tafsir Al-Qur'an Tematik), Jakarta : PT. Lentera Ilmu Makrifat.
- The Oxford American Dictionary, Digital Dictionary, Najm 1515, Super

Tischler. 1999. Agen-Agen Sosialisasi dalam <http://tentangkomputerkita.blogspot.co.id/2010/01>
Titus, Harold H., dkk. 1984. *Persoalan-persoalan Filsafat*. terjemahan Rasjidi. Jakarta: Bulan Bintang